



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 22 Juni 2012

Halaman: 25

## Pemkot: Titik Nol Bebas PKL

Yulianingsih

**Keputusan tersebut merupakan keputusan rapat lintas SKPD Pemkot Yogyakarta.**

YOGYAKARTA — Pemkot Yogyakarta tetap bersikukuh kawasan Titik Nol Kilometer hingga depan Benteng Vredeburg harus bersih dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebelumnya, Pemkot berjanji akan memberikan penyelesaian terbaik bagi PKL di wilayah tersebut. Namun ternyata Pemkot tetap memutuskan wilayah itu harus bersih dari PKL.

Puluhan PKL Titik Nol Kilometer yang mendatangi kantor DPRD Kota Yogyakarta untuk meminta kebijakan karena digusur pada 8 Juni lalu, harus gigit jari. Mereka terpaksa kecewa dengan keputusan Pemkot tersebut. "Sesuai dengan Perda No 26 tahun 2002 dan Perwal No 37 tahun 2010, kita putuskan wilayah itu harus bersih dari PKL," tandas Asisten Bidang Pembangunan dan Perencanaan Aman Yuridjaya saat menemui PKL bersama dengan anggota DPRD di gedung dewan, Kamis (21/6).

Diakui Aman, keputusan itu sudah final. Keputusan tersebut merupakan keputusan rapat lintas SKPD Pemkot Yogyakarta. Kawasan sekitar Titik Nol Kilometer, Gedung Agung, dan Benteng

Vredeburg tidak diperbolehkan untuk aktivitas ekonomi. Di tempat tersebut hanya untuk ruang publik bagi warga Kota Yogyakarta dan wisatawan.

Hal ini juga sudah diatur di Perda No 26 tahun 2002 dan Perwal No 37 tahun 2010. Dengan keputusan itu, sambung Aman, pihaknya tidak bisa memberikan toleransi pada PKL di wilayah tadi. "Kita tidak bisa memberikan toleransi lagi, semua sudah diatur di peraturan dan harus ditaati," tegasnya.

Diakuinya, dalam Perwal disebutkan, PKL hanya diperbolehkan berjualan di trotoar sisi barat Jalan Malioboro dan Jalan A Yani (persimpangan Jalan Malioboro dan Jalan Pasar Kembang sampai simpang tiga Jalan Reksobayan).

Kemudian, trotoar sisi timur Jalan Malioboro dan A Yani (depan Hotel Garuda sampai depan Pasar Sore Malioboro). Kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar Beringharjo.

Selain itu, PKL masih bisa berjualan di sirip jalan Malioboro – A Yani yaitu trotoar Jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, Suryatmajan sisi selatan, dan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB).

Seperti diketahui, PKL di Jalan Ahmad Yani, persisnya di depan Benteng Vredeburg pada 12 Juni lalu mengadu ke kantor wali kota, UPT Malioboro, dan DPRD Kota Yogya.

Aduan itu mereka lakukan setelah Pemkot melakukan penertiban PKL di wilayah itu pada 8 Juni lalu.

Dalam aduannya, mereka meminta Wali Kota Haryadi Suyuti memberikan dispensasi kepada PKL untuk bisa berdagang di daerah larangan tersebut. Mereka beralasan sudah tiga tahun berjualan di tempat itu.

Ketua Paguyuban PKL Depan Benteng Sektor Utara (PPKLDBSU) Suprawoto mengatakan, hanya dari jualan di tempat itulah, mereka menggantungkan hidup. Makanya, saat musim liburan segera tiba, pihaknya bingung adanya penertiban dari Dinas Ketertiban (Din-

**Semua sudah diatur dalam peraturan dan harus ditaati.**

tib) Kota Yogya secara intensif.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Koencoroyekti meminta para PKL untuk bersabar dan mematuhi aturan tersebut. Pihaknya bersama Pemkot akan mencoba untuk mencari solusi terbaik. Meski, larangan berdagang di kawasan itu tetap harus dipatuhi semua pihak.

■ ed : yusuf assidiq

| Instansi                                              | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Ketertiban                                   |              |        |                 |
| 3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan                     |              |        |                 |
| 4. UPT. Malioboro                                     |              |        |                 |

Yogyakarta, 01 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

